



# KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

## http://kliping.dpr.go.id

Judul : Gedung baru, kinerja melorot  
Tanggal : Rabu, 06 Mei 2015  
Surat Kabar : Suara Pembaruan  
Halaman : B8-B9

**Laporan Khusus**

B 8 | Suara Pembaruan | Rabu, 6 Mei 2015

## Gedung Baru, Kinerja Melorot

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali berencana membangun gedung baru di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta Pusat. Gedung baru itu diharapkan menjadi ikon nasional. Namun, rencana itu mendapat penolakan keras dari sejumlah kalangan. Kinerja DPR belum sebanding dengan lokasi anggaran yang dikeluarkan Negara bagi wakil rakyat yang terhormat itu. Mestalah gedung parlemen direnovasi di tengah kinerjanya yang masih melorot? Bagaimana tanggapan anggota dewan? Wartawan SP Hotman Siregar menganalisisnya dalam tulisan berikut.

Ketua DPR Setya Novanto dalam pidato resmi pada Masa Sidang III 2014-2015, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (24/4) lalu mengatakan, pembangunan gedung baru itu sangat penting di tengah penguatan kelembagaan. Menurut politisi Partai Golkar itu, gedung yang ada saat ini tidak lagi memenuhi jumlah anggota DPR dan staf ahli yang terus bertambah. "Dalam rangka penguatan kelembagaan, DPR membentuk Tim kerja Pembangunan Perpustakaan, Museum, Research Center dan Ruang Kerja Anggota dan Tenaga Ahli DPR RI yang sekedar menggantikan ikon masional," kata Novanto.

Rencana serupa sebenarnya sudah dibatalkan pada era DPR periode 2009-2014. Namun, DPR periode 2014-2019 ini berasalan membangun gedung baru untuk perpustakaan, museum pusat riset, dan ruang kerja untuk tenaga ahli dan staf ahli DPR yang jumlahnya semakin banyak.

Yang menjadi pertanyaan mendasik gedung DPR direnovasi atau dikembangkan mengingat kinerja parlemen masih melorot alias jauh dari harapan rakyat? Belum lagi dalam setahun lebih dari separuh waktu, anggota DPR di luar gedung alias resmi?

Saat ini waktu kerja anggota DPR di gedung parlemen dalam membahas undang-undang hanya sekitar 5 bulan dalam setahun. Artinya, dengan jarangnya anggota DPR di gedung Senayan Jakarta apakah gedung baru masih diperlukan?

Pernahnya lagi, rencana merampungkan 37 UU yang masuk dalam Prolegnas tahun ini diperkirakan tidak selesai karena waktunya reses anggota dewan yang terhormat sangat terbatas. Pencapaian pembuatan dan revisi UU selalu tidak tercapai dalam masa tugas DPR.

Selain Partai Gerindra Ahmad Muizani mengaku pesimistik pembausan UU sebagaimana diajukan dalam prolegnas akan tercapai, DPR kini memiliki 11 komisi dan bila dibagi masing-masing pembahasan UU, tiap komisi hanya cukup menyelesaikan minimal 3 UU.

"Saya kira setiap tahun pembausan UU itu pasti tidak terca-

pai. Saya pesimistik dan tidak yakin prolegnas yang ditujukan kepada kami. Sebagian kami paling hanya 60% UU selesai dibahas," katanya di Jakarta, Senin (4/5).

Apakah yang disampaikan Muizani merupakan gambaran kinerja DPR selama ini. Tugas pokok DPR di bidang legislasi cenderung terbatas. Bahkan mungkin karena pembangunan gedung baru DPR dan stafnya. Gedung yang dibangun tahun 1997 itu dibangun untuk ditempati 800 orang, yaitu 450 anggota DPR dan staf.

Namun, sekarang gedung ditempati 2.420 orang. Meruca itu terdiri dari 560 anggota DPR serta dua tenaga ahli dan satu staf pribadi (MD3).

Ke depan, tutur Winantuningtyastuti, jumlah tenaga ahli dan staf administrasi semuanya menjadi 4.357 orang. Ini karena adanya penambahan jumlah tenaga ahli dan staf administrasi, sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2015 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Ia mengatakan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang pembangunan gedung negara, ruang kantor pejabat negara idealnya memiliki luas rata-rata 10 meter persegi. Kini, dengan penambahan tenaga ahli, ruang anggota DPR dikhawatirkan makin di bawah standar.

**Revisi**

Melalui revisi UU MD3 pada Desember 2014 dan perumusan Tata Tertib DPR 2014-2019, jumlah tenaga ahli anggota DPR bertambah dari dua menjadi lima orang. Staf administrasi yang sebelumnya satu orang, jadi dua orang.

Penambahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja anggota Dewan. Namun sejumlah pihak menilai, DPR seharusnya melakukan perencanaan dan kalkulus terlebih dahulu mengenai ketersediaan ruangannya sebelum memutuskan menambah tenaga ahli.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Fornippi), Lucius Karus menilai, pokok masalah yang terpenting di DPR bukanlah menambah jumlah tenaga ahli dan staf administrasi, tetapi mengintegrasikan pola kerja yang akhirnya seluruh bisa mendapatkan tenaga ahli dengan keahlian dan memadai.

Selama ini, perekruitmen tenaga ahli jadi domain anggota DPR. Mereka secara prabidi memiliki dan merekrut tenaga ahli masing-masing. Nama-nama itu berikutnya diajukan ke Sekretaris Jenderal DPR untuk dikeluarkan surat keputusan.

"Pada kenyataannya, perekruitmen tidak selalu terbuka dan sesuai dengan Skema kontoh, aturnanya, tenaga ahli dilangkah memiliki hubungan darah dengan anggota DPR," katanya.

Untuk menyiasati aturan itu, lanjut Lucius, sejumlah anggota Dewan memakai sistem perekruitmen silang. Ia mencocokkan, modus yang dilakukan kelengka dan anggota DPR A menjadi tenaga ahli untuk anggota DPR B dan sebaliknya.

"Akhirnya, sering kali kualifikasi, standar keahlian, dan persyaratan pendidikan dikesampingkan. Sulit menjamin sesorang benar-benar ahli jika perekruitannya bergantung pada subjektivitas anggota sendiri," tutur Lucius.

Lucius menilai, rencana pembangunan perpustakaan, museum dan pusat penelitian yang sepaket dengan gedung baru DPR hanya ajang cari proyek segerlitir oknum wakil rakyat. Lucius berkerja pada faktor perpustakaan dan museum DPR RI ini tak terwacan serta sepi pengunjungnya.

Ia menegaskan sinyalemen bahwa pembangunan fasilitas di DPR pertama-tama bukan karena desakan kebutuhan, bukan karena DPR membutuhkan perpustakaan dan research centre. Lucius menujukkan rencana pembangunan itu

Gedung Parlemen



# KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

## http://kliping.dpr.go.id

Suara Pembaruan

Rabu, 6 Mei 2015

LAPORAN KHUSUS

B 9

memiliki motivasi awal adalah proyek.

Mesertunya, DPR memiliki alasan tersendiri di balik keinginan mewujudkan ambisi itu. Caranya dengan modus membangun perpustakaan dan museum dianggap paling bisa menjadikan tameng untuk menutupi nafsu proyek sebagai anggota dewan.

"Pekerjaan DPR yang besar menunjukkan minat bacan yang tinggi, perpustakaan baru dan mewah tidak harus disediakan terlebih dahulu. Pekerjaan membaca bagi yang suka membaca bisa dilakukan di mana saja dan dengan fasilitas apa saja. Minat bacan ini sebaiknya tidak dijadikan alasan anggota parlemen," tegas Lucius.

Direktur Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi menenggarai ada persekolongan jahat yang dilakukan antar Pemerintah dan DPR meskipun usangnya. "Hari ini punnya bisa dilihati dari barangkali faktanya saling mengamini di antara pemerintah dan DPR meskipun langkah masing-masing pihak jauh dari kota tidak proraksat."

Menurut Uchok, semua langkah pemerintah saat ini diamini oleh DPR. Meskipun harga BBM, listrik dan gas ditetapkan DPR terkecuali di sampingan.

"Padahal rakyat kini semakin terjepit atas kenaikan itu. DPR sama sekali tidak menyuarakan penderitaan rakyat akibat kenaikan harga-harga kebutuhan pokok akibat kebijakan pemerintah ini," kata Uchok.

Dia pun mensinyalir ada modus baru dalam merampok uang rakyat dan perampokan uang rakyat yang tidak lagi menggunakan kata-kata kebangsaan, tapi sudah menggunakan metode-metode terbaru saat ini. Perampokan tidak lagi menggunakan cara menaikkan harga proyek dari nilai sesungguhnya dari anggaran yang ada tapi sudah mengambil langsung dari kantong rakyat.

Dikatakan, dulu pengguna merampok uang rakyat dengan cara menaikkan anggaran yang tidak sesuai fakta. Kini perampokan langsung diambil dari kantong rakyat.

"Contohnya ya rakyat dipaksa memberi BBM, listrik dan gas dengan harga yang tinggi. Untuknya dua kali. Pertama, uang subsidi tidak jelas digunakan untuk apa, karena *toh* sudah beberapa bulan subsidi dicabut dan harga BBM, gas dan listrik naik, tapi tidak ada manfaat berapa yang dirimkati rakyat. Kedua, harga-harga itu bayar lebih mahal dari harga yang sesungguhnya karena monopoli para pengambil kebijakan," tambahnya.

Sementara Politisi Partai Gerinda Desmond J Mahesa mengatakan, Proyeknya masih akan meneliti terlebih dahulu tentang pembangunan gedung DPR tersebut. Gerinda harus terlebih dulu memahami secara detail rencana pembangunan itu.

"Dengan memahami ini kita akan memberikan persetujuan kalau menunjang efektivitas parlemen. Kalau tidak, kita bisa saja tidak akan mendukung," kata Desmond.

Saat ini, kata Desmond, yang menjadi persoalan apakah kebutuhan wakil rakyat untuk kebutuhananya paling diatas DPR. Ketua DPR harus bisa menjaga posisi pimpinan dan wakil-wakil rakyat.

"Posisi kami sama saja dengan ketua DPR. Kalau dia anggap beda baca dulu UU MD3. Kalau dia kelepasan agak aneh juga. Dalam kelepasan dia dituntut untuk kepentingan DPR sendiri. Apakah DPR sudah memberikan kontribusi yang baik belum?" Katanya.

Gerinda, lanjut Desmond, mau menunjukkan rencana pembangunan gedung DPR bukan akal-alakan anggota DPR di mata masyarakat. Itu bukan berarti jangan sampai rencana pembangunan ini menjadi proyek akal-alakan.

"Harus disosialisasikan dulu gagasan ini. Jadi, harus diketahui dulu oleh masyarakat. Bagian yang harus disipaki pimpinan DPR," ucapnya.

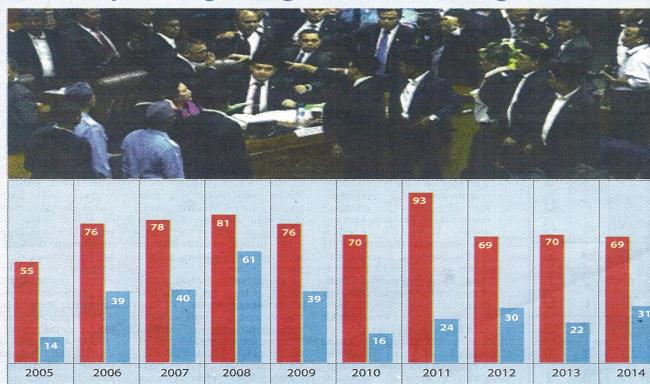
### Ikon Nasional

Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto menyatakan, DPR terus berupaya mewujudkan rencana pembangunan gedung baru yang ditargetkan akan menjadi salah satu ikon nasional. Ketika itu, masa reses DPR kali ini pun akan dimanfaatkan untuk sosialisasi pembangunan gedung baru ke masyarakat.

"Masa reses kali ini tidak hanya dimanfaatkan untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Wakil rakyat juga akan menyampaikan rencana pembangunan gedung baru DPR," katanya.

Politikus Partai Demokrat itu menambahkan, DPR dalam masa reses ini akan sebagian mungkin menyerap pendapat publik tentang rencana pembangunan gedung baru untuk wakil rakyat yang terformat itu. Melalui sosialisasi itu, lanjutnya, akan terlihat apakah rakyat menyentuh atau mengoreksi.

### Data Pencapaian Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2005-2014:



Setya Novanto

FOTO: FOTO:DOK SP

"Silahkan sampaikan kepada anggota dewan. Sebagai wakil rakyat, mereka pasti akan dengarkan suara rakyat yang diwakilinya. Kalau tidak, pasti pada pemilu 2019 rakyat tidak akan mempercayainya."

Forum Indonesia untuk Transparansi dan Akuntabilitas (Fitra) secara tegar menolak rencana pembangunan gedung baru DPR itu. Fitra melihat rencana pembangunan gedung baru yang juga sempat ditolak pada 2010-2011 lalu.

Sejalan FITRA Yenny Supriyatno menekankan, nyaris tak ada perbedaan antara proyek gedung baru DPR 2010 dan 2015. Pada 2010 terdapat tiga pelanggaran administrasi yang tidak sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 45/prt/m/2007 tentang pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara.

Selain itu, harga tidak sesuai dengan standar Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Keseharian (PMK) harus *multiyear*. Tidak hanya itu, potensi *markup* hampir 50% yaitu sekitar Rp 603 miliar.

Saat ini, sambung Yenny, masalahnya sama dengan 2010.

Pertama, ada manipulasi perencanaan pembangunan dan anggaran. Kedua, menyatakan bahwa Kementerian PU dan Kemenkeu. Ketiga potensi markup tinggi. Keempat, sumber danaanya tidak jelas.

"Menolak Rencana Pembangunan Gedung DPR karena tidak ada di anggaran APBN-P 2015. Rencana ini bertolak belakang dengan kondisi masyarakat yang terkena dampak pemangkasan subsidi energi," kata Yenny.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat dan Anggota Komisi IV (PDIP) Bambang Wicaksono menyatakan bahwa fraksinya belum pernah diajak bicara soal rencana pembangunan gedung baru DPR sebagaimana klaim Ketua DPR Setya Novanto.

Bambang mengaku bahwa rencana pembangunan gedung baru DPR itu belum disampaikan pimpinan DPR ke fraksi. Hanya saja, anggota Komisi IV Bambang menilai rencana pembangunan gedung baru berserta perpustakaan, laboratorium hingga *research center* yang akan dijadikan ikon nasional merupakan ide yang baik.

"Sudah seharusnya DPR juga punya karya yang dikehendaki di kemudian hari. Itu ide baik baik saja. Karena menciptakan sesuatu yang monumental. Zaman Novanto apa. Marzuki (ketua DPR 2009-2014) apa, merasa jasa kan pernah diajak bicara. Saya kira gak sampe triliunan," ujar Bambang.

Bambang mengaku bisa memahami kegundahan masyarakat yang menolak gedung baru DPR. Sebab, hal yang selalujadi sorotan adalah biaya pembangunan dan anggaran yang akan mengering.

"Cuma banyak yang gak percaya DPR jumlah damanya dan kontraktor siapa. Mari kita awasi bareng-bareng. Ini cara pandang pimpinan bisa berbeda dalam melihat masalah ini. Saya kira gak sampe triliunan."

Rencana pembangunan gedung sudah disuarakan oleh para anggota Dewan Terhormat saat era Presiden SBY atau DPR di bawah Marzuki Ali pada 2010 hingga 2011. Namun, saat itu rencana pembangunan gedung baru yang diperkirakan menganggarkan dana Rp 1,1 triliun dibatalkan oleh Menteri Keuangan. ♦